



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

TOOLKIT

RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA

KONTEN

1

Kerangka
Pengembangan

2

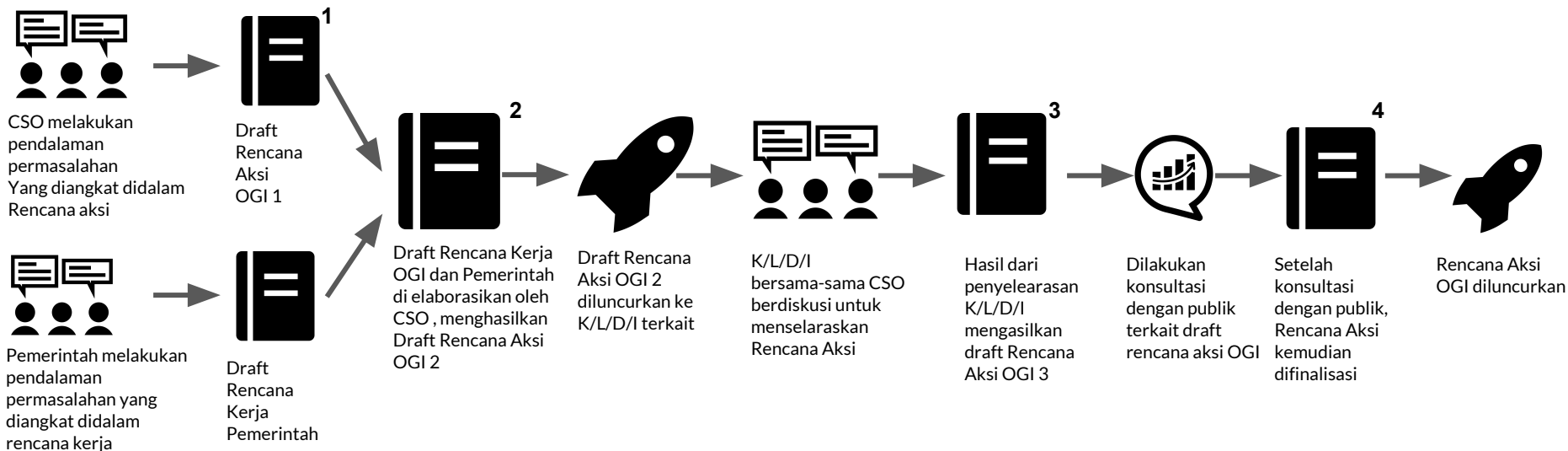
Kanvas
Renaksi

3

Contoh
Renaksi

Kerangka Pengembangan

PERJALANAN RENCANA AKSI OGI

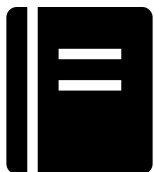


KO-KREASI RENCANA AKSI OGI

Pembuatan Rencana Aksi Nasional OGI dilakukan didalam bentuk Ko-Kreasi dimana banyak terdapat diskusi bersama antara stakeholder berbeda utamanya masyarakat dan pemerintah dalam pembuatan Rencana Aksi.

KONTEN RENCANA AKSI

Draft Rencana Aksi 1



- Terdapat latar belakang masalah
- Terdapat ide dari untuk menyelesaikan masalah
- Terdapat metodologi implementasi ide

Penyusun :

- a. CSO
- b. Sekretariat OGI

Draft Rencana Aksi 2

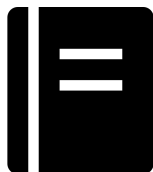


- Terdapat penajaman milestone berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah
- Terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam aksi

Penyusun :

- a. CSO
- b. Sekretariat OGI

Draft Rencana Aksi 3



- Penajaman implementasi aksi bersama dengan K/L/D/I terkait
- Penajaman aktor yang terlibat dalam aksi

Penyusun

- a. CSO
- b. K/L/D/I
- c. Sekretariat OGI

Draft Rencana Aksi 4



- Penajaman rencana aksi berdasarkan masukan dari publik

Penyusun :

- a. CSO
- b. K/L/D/I
- c. Sekretariat OGI
- d. Publik

Rencana Aksi Final



- Rencana aksi sudah dapat dilaksanakan

Penyusun :

- a. CSO
- b. K/L/D/I
- c. Sekretariat OGI
- d. Publik



KELOMPOK KERJA TEMATIK

Pembuatan Rencana Aksi Nasional OGI dilakukan didalam kelompok kerja tematik, kelompok kerja tematik merupakan kelompok kerja yang terdiri dari CSO dan K/L/D/I yang memiliki minat tertentu sesuai dengan topik yang terdapat didalam aksi

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk masuk dalam kelompok kerja tematik :

- Kegiatan berfokus pada topik yang diangkat dalam aksi
- Pernah memiliki penelitian atau proyek yang terkait dengan aksi
- Rencana kedepan terkait dengan topik aksi
- Memiliki ahli yang paham terhadap aksi

METODE KO-KREASI



Formal Discussion (FD)

Merupakan kegiatan diskusi formal yang bertujuan untuk merumuskan keputusan secara garis besar, tidak membahas secara mendetail.



Internal Workshop (IW)

Merupakan kegiatan diskusi dalam kelompok besar yang bertujuan membahas topik-topik secara rinci dan secara interaktif



Tele-Conference (TC)

Merupakan kegiatan diskusi jarak jauh dengan menggunakan sarana video conference, bertujuan untuk menjangkau masukan terhadap NAP.



Public Consultation (Mini Seminar) (PC)

Merupakan kegiatan diskusi dalam forum publik yang bertujuan untuk menjangkau masukan terhadap NAP dari publik secara tatap muka.



Public Consultation via Digital Platform (PCD)

Merupakan portal penjangkauan ide atau masukan satu arah melalui sebuah laman website yang menampilkan secara rinci rancangan dari NAP.

Kanvas Renaksi



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA


TEMPLATE NAP OGI

Template komitmen Rencana Aksi Nasional OGI, disusun berpedoman pada template yang dibuat oleh Sekretariat Open Government Partnership. Template tersebut kemudian diselaraskan dengan kebutuhan pelaksanaan di Indonesia.

TEMPLATE NAP OGI


Template Komitmen
Rencana Aksi Open Government Indonesia

Nama dan nomor dari Komitmen	
Tanggal Mulai dan Selesai Komitmen (E.g. 30 September 2018 - 30 Juni 2020)	
Aktor/badan Pemimpin Implementasi	
Deskripsi Komitmen	
Apa masalah masyarakat yang akan dibahas oleh komitmen ini?	<ul style="list-style-type: none"> Deskripsikan masalah sosial, ekonomi, politik atau lingkungan yang dibahas dalam komitmen. Jika tersedia, masukkan data dasar dan fakta yang mendukung konteks permasalahan.
Apa komitmennya?	<ul style="list-style-type: none"> Deskripsikan apa saja yg diperlukan dalam komitmen, bagaimana hasil yg diharapkan dan tujuannya secara keseluruhan.
Bagaimana komitmen ini berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yg ada di masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> Deskripsikan bagaimana komitmen tersebut akan berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan atau mengubah kinerja pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. <p><i>Tip: untuk melakukan ini, jelaskan bagaimana komitmen akan diimplementasikan. Anda harus menyediakan deskripsi yang jelas bagaimana milestone akan mencapai komitmen-komitmen yang akan dilakukan dan mendapatkan hasil yang diharapkan yang akan berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan.</i></p>

 OPEN GOVERNMENT INDONESIA


TEMPLATE NAP OGI

<p>Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai OGP?</p>	<p>Perhatikan pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apakah komitmen untuk membuka lebih banyak informasi dan memperbaiki kualitas data yang dibuka, akan mempermudah akses untuk informasi tersebut ataupun memberikan informasi yang tepat? Jika demikian, maka komitmen ini relevan untuk transparansi Apakah komitmen menciptakan atau memperbaiki kesempatan ataupun memperbaiki kapabilitas masyarakat untuk kelompok masyarakat dalam negara? Jika demikian, maka komitmen ini relevan untuk partisipasi masyarakat sipil. Apakah komitmen ini menciptakan atau memperbaiki peraturan, regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah secara publik untuk segala tindakan mereka? Jika demikian, maka komitmen ini relevan untuk akuntabilitas publik. <p><i>Jika anda sudah meninjau pertanyaan-pertanyaan diatas, mohon menyediakan informasi yang sesuai dengan respon bagaimana komitmen tersebut berhubungan dengan nilai-nilai yg disebutkan diatas.</i></p>
Kesesuaian dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan komitmen dengan program pemerintah Hubungan dengan Rencana Aksi Nasional dengan perencanaan sektoral lainnya Hubungan dengan rencana lainnya yang relevan seperti Rencana Pembangunan Nasional atau Strategi Anti Korupsi Nasional
Informasi Tambahan	<p>Gunakan ruang ini untuk menyediakan informasi yg berguna lainnya, contohnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dana komitmen Hubungan ke SDGs

 OPEN GOVERNMENT INDONESIA

TEMPLATE NAP OGI

Kegiatan Milestone dengan Penyampaian yang dapat diverifikasi	Periode	Keluaran	Aktor Terlibat
Informasi Kontak			
Nama penanggung jawab dari badan yang mengimplementasi			
Jabatan, Departemen			
Email and Nomor Telepon			
Aktor lain yang terlibat	Aktor pemerintah yg terlibat		
	CSOs, sektor swasta, multilateral, working groups		

 OPEN GOVERNMENT INDONESIA

A. Aktor/ Badan Pemimpin Implementasi

Siapakah badan yang akan menjadi pemimpin dari implementasi dari komitmen yang sudah disusun. Jika memungkinkan tulis secara spesifik di divisi atau bidang mana pada badan yang akan menjadi pemimpin implementasi komitmen

B. Apa masalah masyarakat yang akan dibahas oleh komitmen ini

Deskripsikan masalah sosial, ekonomi, politik atau lingkungan yang dibahas dalam komitmen. Jika tersedia, masukkan data dasar dan fakta yang mendukung konteks permasalahan.

C. Apa komitmennya

Deskripsikan secara keseluruhan apa saja yg diperlukan dalam komitmen, bagaimana hasil yg diharapkan dan tujuannya serta gambaran besar dari komitmen yang dibuat.

D. Bagaimana komitmen ini berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yg ada di masyarakat?

Deskripsikan bagaimana komitmen tersebut akan berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan atau mengubah kinerja pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tip: untuk melakukan ini, jelaskan bagaimana komitmen akan diimplementasikan. Anda harus menyediakan deskripsi yang jelas bagaimana milestone akan mencapai komitmen-komitmen yang akan dilakukan dan mendapatkan hasil yang diharapkan yang akan berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan.

E. Mengapa komitmen ini relevan terhadap nilai-nilai OGP?

Apakah komitmen untuk membuka lebih banyak informasi dan memperbaiki kualitas data yang dibuka, akan mempermudah akses untuk informasi tersebut ataupun memberikan informasi yang tepat? Jika demikian, maka komitmen ini relevan untuk transparansi. Apakah komitmen menciptakan atau memperbaiki kesempatan ataupun memperbaiki kapabilitas masyarakat untuk kelompok masyarakat dalam negara? Jika demikian, maka komitmen ini relevan untuk partisipasi masyarakat sipil. Apakah komitmen ini menciptakan atau memperbaiki peraturan, regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah secara publik untuk segala tindakan mereka? Jika demikian, maka komitmen ini relevan untuk akuntabilitas publik.

Jika anda sudah meninjau pertanyaan-pertanyaan diatas, mohon menyediakan informasi yang sesuai dengan respon bagaimana komitmen tersebut berhubungan dengan nilai-nilai yg disebutkan diatas.

F. Kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah

Apa hubungan komitmen dengan program pemerintah? Apa hubungan komitmen dengan Rencana Aksi Nasional dengan perencanaan sektoral lainnya? Apa hubungan dengan rencana lainnya yang relevan seperti Rencana Pembangunan Nasional atau Strategi Anti Korupsi Nasional?

G. Informasi Tambahan

Gunakan bagian ini untuk menyediakan informasi yg berguna lainnya, contohnya: Dana komitmen atau Hubungan ke SDGs, dan lainnya.

Milestone

Merupakan tahapan pencapaiann untuk mencapai tujuan dari komitmen. Pada bagian ini jelaskan secara rinci dengan maksimum 5 capaian yang akan didapatkan. Didalam tiap capaian turut disertakan periode memulai aktifitas dan akhir aktifitas, kemudian apa keluaran dari setiap capaian, berikut dengan aktor yang terlibat didalam setiap aktifitas. Masing-masing aktifitas dapat memiliki keluaran dan aktor yang berbeda-beda.

Kontak

Merupakan kontak secara rinci siapa yang menjadi kontak didalam setiap komitmen, termasuk CSO atau aktor-aktor lain yang terlibat. Berikan kontak secara rinci sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi ketika pelaksanaan komitmen.

Contoh Renaksi

UK NAP 2016 - 2018

Commitment number and title	Commitment summary	Lead implementing organisation(s)	Other actors involved - government	Other actors involved - CSOs, private sector, working groups, multilaterals etc
1. Beneficial ownership	We will establish a public register of company beneficial ownership information for foreign companies who already own or buy property in the UK, or who bid on UK central government contracts.	Department for Business, Innovation and Skills	Cabinet Office	mySociety, Natural Resource Governance Institute, ONE, Publish What You Pay UK, The Open Data Institute, Transparency International UK
2. Anti-Corruption Innovation Hub	We will incubate an Anti-Corruption Innovation Hub to connect social innovators, technology experts and data scientists with law enforcement, business and civil society to collaborate on innovative approaches to anti-corruption.	Cabinet Office (Government Digital Service)	Department for International Development, Foreign and Commonwealth Office	Other governments (Switzerland, Indonesia, Spain, Georgia, UAE, Australia, Norway and France), The Omidyar Network, Thomson Reuters, Transparency International UK, Vodafone

US NAP 2015 - 2017

1. Reconstitute USA.gov as the Front Door to the U.S. Government

For a government to truly be open, the public must be able to find information about government activities and services. Established by the e-Government Act of 2002 as the official web portal of the U.S. Government, USA.gov has a long history of connecting millions of citizens to the government information and services they need. Recently re-launched to be more responsive to users, USA.gov has become a more efficient and adaptive publishing platform for Federal, state, and local governments. Going forward, the General Services Administration will implement additional user-centered enhancements, including delivering enhanced content, and will work with agencies to help the public identify and receive services they need based on their own goals rather than government structure.

2. Collaborate with Citizen and Global Cartographers in Open Mapping

Engaging communities to use open mapping platforms ensures the widest possible benefit of geographic data and improved public services for individuals and communities using that data. The Administration will expand interagency collaboration and coordination with the open mapping community to promote the use of open mapping data in both domestic and international applications. Specifically, the State Department will continue and expand its public diplomacy program for open mapping, MapGive. Additionally, the Peace Corps will train volunteers to collaborate with their host communities on using and contributing to open mapping platforms. The U.S. Agency for International Development will promote the use of open mapping platforms in its programs and through data creation and youth engagement initiatives like Mapping for Resilience. The Department of the Interior will continue to promote the use of open mapping technologies to manage and share data in interactive map capabilities, including in production of the National Park Service's digital map program's web and mobile products. The U.S. Geological Survey will also continue crowdsourcing mapping efforts.

PHILIPPINE NAP 2017 - 2019

10. Improve Institutional Mechanisms for Immediate and Effective Disaster Response (Program: DROMIC Virtual OpCen: Revolutionizing Disaster Response in DSWD)

June 30, 2017- June 30, 2019

Lead implementing agency/actor Department of Social Welfare and Development

Commitment description

What is the public problem that the commitment will address?

The need for accurate and up-to-date data and information to support disaster risk reduction and management operations has long been recognized by DSWD. Ensuring the availability, quality and accessibility of disaster related data and information for all stakeholders before, during and after a disaster is critical in the improvement of mechanisms for effective and efficient disaster response. With this in mind, the Department of Social Welfare and Development, through the Disaster Response Assistance and Management Bureau (DReAMB), has actualized the critical step towards continual improvement of disaster response mechanisms by establishing its Emergency Operations Center for disaster response and has developed its online version, the DROMIC Virtual Operations Center microsite accessible via the internet.

What is the commitment?

In support to the call for freedom of information embodied in Executive Order No. 2 Series of 2016, the DSWD is committed to improve its institutional mechanisms by the establishment and implementation of the DROMIC Virtual OpCen (Disaster Response Operations Monitoring and Information Center-Virtual Operations Center), to provide the general public with access to a comprehensive collection of data and information on the agency's disaster preparedness and response efforts through information and communication technologies that facilitate transparency, accountability, citizen engagement, and good governance.

How will the commitment contribute to solve the public problem?

To provide DSWD's disaster preparedness and response related data, information, advocacies and efforts to Disaster Response Stakeholders and the general public through the use of popular information and communication technologies (ICTs) that facilitate transparency & good governance.

Through the DROMIC Virtual OpCen, which incorporates a collection of comprehensive and reliable information related to disaster response management, the e-Reklamo Complaints Management Ticket System, and the Quick Response Team (QRT) Registry (with the prospective Disaster Response Surge Corps), the public will have access to DSWD disaster-related information, services, and resources that they can use to secure and promote their welfare and safety during disasters.

response management); WASH (water, sanitation & hygiene); and MEAL (monitoring, evaluation, accountability & learning) in disaster response.

To further engage the private and public sectors, civil society organizations, other stakeholders and the general public to contribute to the disaster response efforts, and as an enhancement of the QRT, the DSWD through DReAMB shall establish the Disaster Response Surge Corps (DRSC), a total, purposive, coordinated, and inter-operable human resource capacity for quick, effective, adequate, and reliable community-oriented disaster response to deal with national, regional, or local hazard situations. The DRSC complements the functions and operations of DSWD and shall be organized and engaged through a multi-stakeholder partnership framework such as that which may actively involve GO/CSO/PO partners and a program for institutionalized and anticipatory disaster response surge deployment to create a network of Disaster Response Volunteers.

Through the Disaster Response Surge Corps, civic participation will be fostered through formal public engagement in the volunteer network. In further advancing the value of technology and innovation for openness and accountability, this will be promoted through engaging multi-stakeholder partners such as those in other government organizations, civil society, people's organizations as well as those in the private sector (e.g. business community) to be active participants in the identification of and contribution to effective practices and innovative approaches in the implementation of the disaster response services that will lead to empowering the people and promoting transparency in the government.

Additional information

Milestone Activity with a verifiable deliverable	Start Date:	End Date:
Enhancement of the DROMIC Virtual OpCen through the integration of the e-Reklamo CMS Platform	June 2017	June 2019
Partnership building with two (2) regional and international space agencies for immediate access to satellite imagery for damage assessments (MOU with Inmarsat and Sentinel Asia)	July 2017	June 2019
Issuance of policy/ies and guidelines to establish the National and Regional Disaster Response Surge Corps (DRSC)	September 2017	December 2017
Establishment of Multi-Stakeholder Framework that will organize and	January 2018	July 2018

BRAZIL NAP 2016 - 2018

Axes	Themes	Commitments
Open Government Structuring Themes	Open Data on the Federal Government	Identify and implement mechanism for recognizing solvable or mitigable problems, upon the data presented by the government, which meets expectations from requesters and providers.
	Transparency of Public Funds	Formulate a strategic matrix of transparency actions, with broad citizen participation, in order to promote better governance and to ensure access and effective use of data and public resource information.
	Access to Information Policy in the Federal Government	Enhance mechanisms in order to assure more promptness and answer effectiveness to information requests, and the proper disclosure of the classified document list.
		Ensure requester's personal information safeguard, whenever necessary, by means of adjustments in procedures and information access channels.
	Effectiveness of National Policy for Social Participation Mechanisms	Integrate online tools on a single platform, in order to consolidate/strengthen the Social Participation System (SPS).

Open Government and Protection of Rights	Digital Educational Resources	Establish a new model for assessing, purchasing, fostering and distributing Digital Educational Resources (RED), in the context of digital culture.
	Open Data and Information Governance in Health	Make available answers to requests for access to information, registered over the last 4 years, on an active transparency platform and increase the number of indicators and data of the Strategic Management Support Room (SAGE), being under civil society oversight.
	Prevention to Torture and Mean, Inhuman or Humiliating Treatments in the Penitentiary System	Implement a unified and open format computerized prison inspection system, ensuring civil society participation in its development and management.
	Open Data and Active Transparency in Environment Issues	Make room for dialogue between government and society, aiming at generating and implementing actions related to transparency in environment issues.
	Mapping and Participatory Management for Culture	Consolidate the National System of Information and Indicators on Culture (SNIIC), for data generation, diffusion and shared use, information and performance indicators for the co-management of culture.



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

#JADIOPEN